BAB II
TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Penelitian Terdahulu

Menurut (Safitri, 2021) IPEI merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengukur tingkat inklusivitas pembangunan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional di Indonesia. IPEI ada kaitannya dengan kemiskinan seperti yang dikatakan (Rahmawati *et al.*, 2021). Selain pertumbuhan ekonomi, IPEI berguna untuk menghitung kemajuan dalam hal akses ke sumber daya ekonomi, pemerataan pendapatan, akses ke layanan dasar seperti pendidikan maupun kesehatan, dan keterlibatan dalam proses pembangunan ekonomi. Ketika lebih banyak orang memiliki kemampuan finansial yang lebih baik, lebih banyak kesempatan untuk menjadi kreatif dan inovatif. Inklusivitas sosial dan ekonomi dipromosikan melalui pembangunan ekonomi inklusif, yang memiliki potensi untuk menghasilkan peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Dengan menggunakan indeks pembangunan ekonomi yang inklusif sebagai alat pengukur, pemerintah dan organisasi dapat lebih memahami dampak kebijakan ekonomi mereka pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengarahkan upaya mereka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Indeks pembangunan ekonomi inklusif memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan berpartisipasi dalamnya. Hal ini termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, pekerjaan, dan layanan publik. Dikarenakan adanya ketidaksetaraan ekonomi dapat menyebabkan ketegangan sosial dan konflik, masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, yang dapat membantu mencegah ketegangan sosial dan konflik. Indeks pembangunan ekonomi inklusif mempertimbangkan kesejahteraan ekonomi manusia dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang rentan dan terpinggirkan. Hal ini dapat membantu mengevaluasi sejauh mana kebijakan ekonomi dapat menciptakan kesetaraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Semakin banyak orang yang memiliki akses ke sumber

daya dan peluang ekonomi, semakin besar potensi pertumbuhan jangka panjang.

Sebagai langkah awal menuju pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal yang akan diulas, dalam penelitian ini memberikan kerangka konseptual yang mencakup konsep-konsep utama, teori-teori yang relevan, dan kerangka kerja yang mendukung analisis lebih lanjut mengenai dampak terhadap Pembangunan ekonomi inklusif di Kawasan timur Indonesia. Landasan konseptual ini menjadi dasar bagi pembaca untuk memahami kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini serta untuk mengenali hal apa yang akan diselidiki lebih lanjut melalui penelitian teoritis selanjutnya, dimana diantaranya adalah :

Penelitian (Prasetyia, 2021) yang berjudul ”Kualitas Pemerintahan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Jawa Timur” menunjukkan hasil bahwa, Pertumbuhan inklusif menitikberatkan pada pemerataan manfaat di seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok kaya, menengah, dan miskin. Hal ini disebabkan oleh risiko bahwa pertumbuhan yang hanya menguntungkan golongan miskin berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sri Hartati, 2021) yang berjudul ”Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia”. Dalam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 2010-2019 belum mengalami peningkatan yang konsisten di tingkat nasional. Selain itu, kemiskinan dan ketidaksetaraan masih belum menunjukkan penurunan. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif.

Penelitian (Damayanti *et al.*, no date) yang berjudul ”Analisis Pertumbuhan Inklusif Dalam Kemiskinan Di Indonesia” menyatakan bahwa Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa pendidikan dan alokasi pengeluaran pemerintah tidak memiliki dampak terhadap pertumbuhan inklusif dalam konteks mengurangi tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Maryam and Irwan, 2022) yang berjudul ”Indeks Pembangunan/Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat" hasilnya mengungkapkan bahwa Pada periode 2013-2020, Indeks Pembangunan Inklusif Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai kategori "memuaskan" dengan nilai rata-rata sebesar 5,36. Indeks Pertumbuhan Inklusif (Subpilar 1) juga berada dalam kategori yang sama. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama tahun 2013-2020 mencapai rata-rata 66,17, ditempatkan dalam kategori "Sedang" (60<=IPM<70). Usia harapan hidup penduduk dalam rentang waktu tersebut mencapai rata-rata 65,58 tahun. Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai rata-rata 13,20 tahun, dengan rata-rata lama sekolah penduduk sebesar 6,90 tahun. Pengeluaran perkapita penduduk rata-rata mencapai Rp 9.738.000,-

Penelitian yang dilakukan oleh (Romhadhoni, Faizah and Afifah, 2019) yang berjudul "Analisis Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1992-2012" mengungkapkan bahwa dari hasil analisis konvergensi, ditemukan bahwa antara tahun 1992-2012, tidak terjadi konvergensi absolut maupun kondisional. Pertumbuhan ekonomi di wilayah yang termasuk dalam kategori miskin relatif terus menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih lambat jika dibandingkan dengan wilayah yang lebih kaya. Meskipun demikian, melalui analisis konvergensi sigma, dapat diamati bahwa terjadi konvergensi sigma dalam perekonomian Indonesia, yang ditandai dengan penurunan nilai koefisien variasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nala Puspita, Sodik and Sri Rahayu Budi Hastuti, 2022) yang berjudul "Analisis Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta" Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel Kesehatan dan Pembentukan Modal Tetap Bruto memiliki dampak positif yang signifikan terhadap konvergensi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, variabel Pendidikan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap konvergensi pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, variabel Kesehatan, Pendidikan, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto bersama-sama memberikan pengaruh terhadap konvergensi pertumbuhan ekonomi.

B. Landasan Teori

1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Teori yang dikenal sebagai vicious circle pada tahun 1971 dalam buku yang berjudul *vicious circle of poverty* dalam pembangunan ekonomi pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom Estonia bernama Ragnar Nurkse. Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan suatu negara atau wilayah dapat menjadi semacam lingkaran yang sulit untuk dipecahkan karena faktor-faktor yang saling memperkuat satu sama lain. Teori ini secara umum menggambarkan bahwa kondisi miskin akan menarik keadaan miskin yang lain, dan bahwa negara-negara miskin cenderung terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk ditinggalkan. Nurkse berargumen bahwa negara-negara miskin cenderung terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena kurangnya investasi yang memadai. Kurangnya investasi mengarah pada kurangnya pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya menyebabkan lebih sedikit peluang kerja dan pendapatan yang rendah bagi penduduk. Dengan pendapatan yang rendah, orang-orang tidak mampu untuk menyisihkan uang untuk investasi masa depan, dan siklus kemiskinan terus berlanjut. Untuk mengakhiri lingkaran kemiskinan, Nurkse menyarankan perlunya meningkatkan investasi produktif di negara. Dengan meningkatnya investasi, ekonomi dapat tumbuh lebih cepat, menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk. Ini pada gilirannya dapat mendorong lebih banyak investasi, membantu negara keluar dari lingkaran kemiskinan.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Terdapat berbagai faktor yang bisa dilihat sebagai acuan untuk dapat memaksimalkan strategi pembangunan ekonomi inklusif. Faktor pertama yang dapat dilihat dalam hal ini adalah tingkat pengangguran terbuka, dimana pengangguran terbuka ini menjadi salah satu faktor yang dilihat oleh setiap masyarakat luas. Menurut Sadono dalam (Malentang, Walewangko and Siwu, 2022) mendefinisikan bahwa pengangguran dapat didefinisikan sebagai situasi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja memiliki keinginan untuk mendapatkan pekerjaan, namun belum berhasil mencapainya. Menurut kerangka konsep International Labour Organization (ILO), pengangguran terbuka disebut sebagai pengangguran. Definisi pengangguran ini mencakup populasi yang aktif mencari pekerjaan, mereka yang sedang mempersiapkan usaha, dan individu yang tidak sedang mencari pekerjaan karena merasa sulit untuk mendapatkannya tetapi belum memulai bekerja. Tingkat pengangguran

terbuka pada kawasan timur Indonesia ini menjadi bukti bahwasannya masyarakat timur Indonesia susah menjangkau pekerjaan pada kawasan mereka sendiri sehingga hal tersebut mengakibatkan pengangguran yang ada pada kawasan timur Indonesia ini memiliki angka yang cukup tinggi sehingga hal tersebut menjadikan kawasan timur Indonesia lebih tertinggal dibandingkan dengan kawasan Indonesia lainnya. Belum lagi pandangan manusia bahwasannya pengangguran sebagai masalah besar yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan manusia dan juga kehilangan pekerjaan sama halnya menurunkan kualitas hidup. Bisa dilihat fenomenanya dimana banyak masyarakat timur Indonesia mencari pekerjaan diluar kawasan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dalam hal ini tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai patokan untuk melihat kawasan timur Indonesia yang tertinggal.

Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Umr, Dan Tpt Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia” menunjukkan hasil bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Aprilya and Juliprijanto, 2022).

3. Jumlah Penduduk Miskin

Faktor selanjutnya yang dapat menjadi lisensi untuk mensukseskan pembangunan ekonomi inklusif adalah dengan melihat Jumlah Penduduk Miskin yang ada pada kawasan timur Indonesia yang masih banyak jumlahnya. Dari hal tersebut dapat mengakibatkan kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat karena masyarakat miskin tidak cukup biaya untuk

dapat melakukan standarisasi hidup dengan layak. Jumlah penduduk miskin yang ada di kawasan timur Indonesia menjadikan keterlambatan dalam meminimalisirkan kesenjangan dengan daerah lainnya. Jumlah Penduduk Miskin sendiri tentunya harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai bentuk dan upaya untuk mensejahterakan setiap kalangan atau lapisan pada seluruh masyarakat. Dengan begitu pembangunan ekonomi inklusif dapat menjadi strategi yang berguna karena pada dasarnya pembangunan ekonomi inklusif ditujukan setiap lapisan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam bermasyarakat, kesejahteraan yang harus dimiliki dan juga meminimalisirkan kesenjangan yang ada pada setiap kalangan masyarakat baik pada kawasan timur Indonesia maupun kawasan Indonesia lainnya. Dengan demikian pembangunan ekonomi inklusif dapat dikatakan berpengaruh baik bagi pengangkatan kesejahteraan masyarakat.

Teori lingkaran setan kemiskinan pertama kali diperkenalkan oleh Ragnar Nurkse dalam bukunya yang berjudul Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries (1953). Persoalan kemiskinan terjadi karena akumulasi berbagai persoalan dan melibatkan banyak aspek. Bukan hanya aspek ekonomi tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, budaya, politik, sumber daya manusia (SDM) dan aspek lainnya. Lingkaran setan kemiskinan merupakan suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu Negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Selain itu, ia juga membahas fungsi pemerintah dalam mengendalikan perekonomian. Penelitian yang berjudul "Pengaruh Jumlah Penduduk, Umr, Dan Tpt Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia" menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penduduk. (Aprilya and Juliprijanto, 2022).

3. PDRB

Kemudian faktor selanjutnya yang dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan ekonomi inklusif adalah dengan melihat PDRB pada kawasan timur Indonesia, dalam hal ini PDRB bertujuan sebagai bentuk tujuan untuk

melihat bagaimana kemampuan kawasan timur Indonesia untuk meningkatkan daya ekonomi pada suatu daerah dengan melihat PDRB atas dasar harga berlakunya. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana kemampuan masyarakat dalam pemenuhan perekonomian yang baik untuk kesejahteraan masyarakat nantinya. PDRB berfungsi sebagai bentuk pengawasan dan melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi pada kawasan timur Indonesia dari tahun ke tahun dengan melihat melalui PDRB atas dasar harga berlakunya, dengan begitu kita dapat melihat bagaimana upaya yang dihasilkan daerah pada kawasan timur Indonesia untuk tetap menjaga PDRB kawasan timur Indonesia agar tetap terjaga guna untuk melihat bagaimana kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun. Dengan demikian akan dapat melakukan monitoring untuk tujuan pembangunan ekonomi inklusif lebih baik.

Penelitian yang berjudul "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta" menunjukkan hasil bahwa Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi positif oleh PDRB pada harga konstan dan harga berlaku, sementara tidak memberikan dampak pada tingkat pengangguran terbuka. (Romhadhoni, Faizah and Afifah, 2019).

4. PMDN

Faktor selanjutnya yang dapat dilihat sebagai bentuk keberhasilan pembangunan ekonomi inklusif adalah Penanaman Modal Dalam Negeri. Penanaman Modal Dalam Negeri akan memberikan suntikan modal yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian pada masyarakat guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penanaman Modal Dalam Negeri ini bisa digunakan untuk membantu menaikkan kinerja daerah dan bisa dimanfaatkan untuk mengelola tingkat pengangguran terbuka dengan cara membangunkan lahan pekerjaan untuk masyarakat sehingga dapat mengurangi kesenjangan masyarakat miskin dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang ada pada kawasan timur Indonesia ini. Penanaman Modal Dalam Negeri ini tentunya memiliki tujuan untuk masa berkepanjangan sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang ada pada masyarakat nantinya.

Penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh Pma, Pmdn Dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Surabaya" menunjukkan hasil bahwa PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) memiliki peran yang sangat signifikan dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Fungsi ini mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan daya saing perusahaan dalam negeri, peningkatan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta pengelolaan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil. Semua ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber dana baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Zabilla Buciarda, Priana and Wahed, 2021).

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks Pembangunan ekonomi inklusif

   Dalam penelitian yang dilakukan (GANI, 2022) variabel tingkat pengangguran terbuka bernilai negatif dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Selanjutnya dikatakan (Eni, 1967) Tidak hanya fluktuasi angka pengangguran cenderung meningkat dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga tingkat inflasi cenderung mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini merupakan hal yang baik karena mengurangi tingkat inflasi kecil akan mengurangi angka pengangguran. Namun, faktanya, tingkat inflasi sebenarnya tidak menurunkan angka pengangguran yang tinggi. Pemerintah harus memperhatikan masalah ini, baik dari pihak yang bertanggung jawab maupun dari pihak lain. Fokus penelitian adalah bagaimana masing-masing dari tiga variabel independen tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Fokus utama penelitian ini adalah tingkat pengangguran karena dapat menunjukkan sejauh mana lapangan kerja tersedia dan seberapa siap pasar tenaga kerja untuk menyerap tenaga kerja yang ada. Tingkat pengangguran tinggi dapat merupakan indikasi bahwa ekonomi daerah mengalami ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran

tenaga kerja. Fakta bahwa tingkat pengangguran yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, sementara penurunan tingkat pengangguran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

2. Hubungan jumlah penduduk miskin terhadap indeks Pembangunan ekonomi inklusif

Dalam penelitian (Nugroho Arif Sudibyo *et al.*, 2020) Karena jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara, kenaikan atau penurunan jumlah penduduk miskin bukanlah refleksi dari keadaan nyata di Indonesia. Namun, baik pemerintah maupun masyarakat harus memperhatikan hal ini bersama-sama.

Kaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak dari jumlah penduduk miskin terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Kawasan timur Indonesia.

3. Hubungan produk domestik regional bruto terhadap indeks Pembangunan ekonomi inklusif

Penelitian (Hartono, Busari and Awaluddin, 2018) PDRB dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB untuk menghitung nilai tambah barang dan jasa tersebut menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menghitung nilai tambah barang dan jasa tersebut menggunakan harga yang berlaku pada tahun dasar tertentu.

Kaitan dengan tujuan penelitian ini adalah penting untuk dicatat bahwa meskipun PDRB memiliki dampak positif pada pembangunan ekonomi inklusif, upaya tambahan seperti kebijakan redistribusi pendapatan, pendidikan yang merata, dan dukungan kepada sektor ekonomi mikro dan kecil juga diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dinikmati secara luas oleh semua lapisan masyarakat.

4. Hubungan penanaman modal dalam negeri terhadap indeks Pembangunan ekonomi inklusif

Penelitian (Asiyan, 2020) mengatakan Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2007, penanaman modal dalam negeri didefinisikan sebagai

"kegiatan untuk menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum", dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 mendefinisikan modal dalam negeri sebagai "modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan.

Kaitan dengan tujuan penelitian ini adalah penting untuk dicatat bahwa dengan adanya PMDN memiliki dampak positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif melalui beberapa mekanisme diantaranya : pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, reduksi kesetaraan ekonomi, peningkatan pendekatan masyarakat, serta pengembangan wilayah.

D. Kerangka Pikir

Dengan latar belakang permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas, sebuah kerangka pikir telah muncul untuk menjelaskan pengaruh variabel terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Kawasan timur Indonesia yang diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang digambarkan skema sebagai berikut :

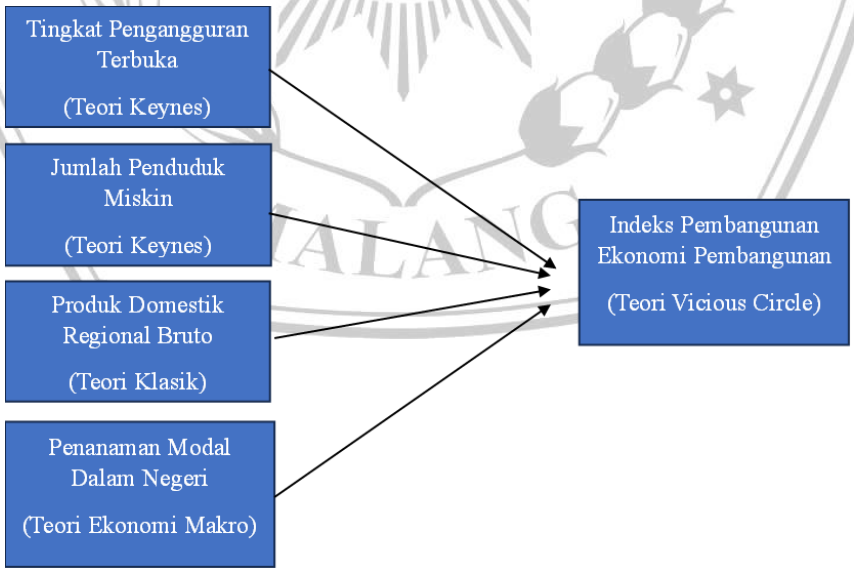

Sumber : Nurks, 1971, data diolah 2024

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

E. Hipotesis

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut **:**

Diduga variabel pengangguran, penduduk miskin, produk domestik regional bruto, dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi inklusif di kawasan timur Indonesia.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG